

Politik Identitas dalam Birokrasi di Kabupaten Maybrat

Jonny Ricardo Kocu¹, Guno Tri Tjahjoko²

¹ Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia.

Informasi Artikel: Submit: Maret 2022, Revisi: April 2022, Diterima: Mei 2022

Abstract:

The research problem is the strengthening of identity politics in Maybrat Regency, West Papua Province, especially in the placement of officials in the government bureaucracy. The aim of this research is to describe the practice and reveal the factors that cause the strengthening of identity politics. This research uses qualitative and descriptive methods. Finding that the government bureaucracy in Maybrat district practices a spoil system in the recruitment and placement of officials in the OPD structure. Two factors that cause this are the results of the 2017 regional elections (politics of remuneration) and the sentiment of sub-ethnic identity similarity. There is a certain sub-ethnic domination in the government bureaucracy. Meanwhile, the strengthening of identity politics in Maybrat district is driven by four things: 1) past history (hatred and demands for dignity). 2) elite tactics that manipulate the issue community and sub-identity "self-esteem" narratives. 3) social facts that sub-identity awareness is stronger than shared identity; Major. 4) the power that is managed by the regent of Maybrat which drags all practices into the sentiment of identity.

Keywords: Identity Politics, Ethnicity, Bureaucracy.

Abstrak:

Problem penelitian yakni menguatnya politik identitas di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, terutama dalam penempatan pejabat pada birokrasi pemerintahan. Tujuan penelitian berupaya mendeskripsikan praktik dan mengungkapkan faktor penyebab menguatnya politik identitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif serta bersifat deskriptif. Menemukan bahwa birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat mempraktikkan sistem spoil dalam perekrutan dan penempatan pejabat dalam struktur OPD. Dua faktor penyebab hal tersebut yaitu hasil pilkada tahun 2017 (politik balas jasa) dan sentimen kesamaan identitas sub etnis. Terdapat dominasi sub etnis tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Sedangkan, menguatnya politik identitas di kabupaten Maybrat, didorong oleh empat hal : 1) sejarah masa lalu (kebencian dan tuntutan martabat). 2) siasat elit yang memanipulasi masyarakat isu dan narasi "harga diri" sub identitas. 3) fakta sosial bahwa kesadaran sub identitas lebih kuat dibanding identitas bersama; Maybrat. 4) kekuasaan yang dikelola bupati Maybrat yang menyeret segala praktik ke dalam sentimen identitas.

Kata kunci: Politik Identitas, Etnis, Birokrasi.

*Corresponding author: Jonny Ricardo Kocu

E-mail address: joekocu6@gmail.com guno@apmd.ac.id

The content of this website is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) license. Creative Commons License.

PENDAHULUAN

Politik identitas merupakan fenomena politik yang kini menjadi gerakan politik konterporer. Kebangkitan politik identitas merupakan satu hal tak terelakan dalam kehidupan sosial politik, sebab identitas merupakan salah satu elemen yang melekat dalam diri individu maupun kelompok, artinya identitas sebagai kenyataan hidup. Namun, di sisi lain politik identitas juga membawa beragam problem. Seperti konflik antara identitas (agama atau etnis), dan pertarungan dalam pesta demokrasi (pilpres atau pilkada) yang sarat dengan isu dan narasi identitas. Sehingga menciptakan polarisasi, perpecahan dan

perbedaan dalam masyarakat. Bahkan politik identitas menjerat birokrasi pemerintahan kita, membawa praktik birokrasi ke arah kemunduran, sehingga upaya reformasi birokrasi menjadi terhambat.

Kita ketahui bersama dalam kontestasi politik seperti, pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 dan Pilpres tahun 2019. Kedua pesta demokrasi tersebut cukup memberi kita gambaran bagaimana identitas digunakan dalam politik, terutama isu agama, suku dan etnis cukup seksi dikampanyekan untuk memobilisasi massa dan meraih dukungan elektoral. Hal ini juga secara jelas ditunjukkan oleh Francis Fukuyama dalam bukunya *IDENTITAS, Tuntutan Atas Martabat dan Politik Kebencian* (2020). Menurutnya, politik Abad ke-20 berjalan dalam spektrum kanan-kiri berdasarkan isu-isu ekonomi, kelompok kiri ingin kesetaraan dan kelompok kanan ingin kebebasan yang lebih besar. Pada abad ke 21 spektrum tersebut tampak luluh di banyak wilayah yang sarat akan definisi identitas. Kelompok kiri berfokus pada ketimpangan ekonomi yang lebih luas dan lebih banyak mempromosikan kepentingan berbagai kelompok marginal ; kulit hitam, imigran, perempuan, LGBT, pengungsi dan sejenisnya. Sementara itu, kelompok kanan mendefinisikan diri sebagai patriot yang berupaya melindungi identitas nasional, identitas yang secara eksplisit berhubungan dengan ras, agama atau etnis (Fukuyama 2020:5). Poin inti dari pandangan Fukuyama bahwa dunia abad ke-21 adalah masa dimana identitas sebagai komoditas politik yang kuat, artinya pertarungan politik cenderung didasarkan pada identitas, dibanding pertarungan kelas seperti yang dipikirkan kaum marxis.

Dalam konteks Papua, sejak diberlakukan Otonomi Khusus (Otsus) Papua sejak tahun 2001 dan maraknya pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua. Selain memberi beberapa manfaat, tentu juga, membawa beragam problem baru bagi kehidupan sosial politik di Papua, yaitu kebangkitan dan pertarungan politik identitas antar sesama orang Papua. Sehingga terjadi politik perbedaan, menyebabkan ada dikotomi seperti orang Papua pesisir/pantai *versus* Papua gunung. Seperti ditulis oleh Wempi Wetipo dan Marten Medlama (2015) bahwa perbedaan (dikotomi) pesisir dan gunung, yang selama ini tidak sadar dibangun oleh orang Papua sendiri, adalah sebuah kesalahan fatal, karena pengelompokan berdasarkan kondisi geografis bukanlah sebuah jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi di Papua (Wetipo dan Medlama, 2015:11). Apa yang disampaikan kedua penulis tersebut menunjukkan bagaimana pemisahan orang Papua ke dalam kelompok identitas, berbasis geografis, dan bagi kedua penulis hal ini tidak menjadi jawaban atau menjadi solusi atas berbagai persoalan di tanah Papua. Senada dengan politik

identitas, I Ngurah Suryawan dalam bukunya *Jiwa Yang Patah* (2019) banyak membahas problem yang sama. Menurutnya, perebutan kekuasaan di tanah Papua kehadiran sentimen marga dan suku tidak dapat dihindarkan. Retorika tidak membedakan suku, agama, dan ras dapat dipastikan hanya diucapkan sebagai pidato pencitraan. Pada kenyataannya kepentingan kelompok suku dan marga sangatlah kental (Suryawan, 2019: 220). Apa yang disampaikan Suryawan, pada dasarnya menunjukkan bahwa fenomena politik identitas di Papua sangat kental dalam politik dan pemerintahan (birokrasi).

Pertarungan kesukuan atau etnis, marga dan kampung dalam politik di Papua (termasuk Kabupaten Maybrat), seperti pada saat pilkada dan penempatan posisi dalam birokrasi yang didasarkan pada identitas. Sehingga, muncul fenomena baru dimana sesama orang Papua saling membedakan (politik perbedaan) memarginalisasi dalam birokrasi, muncul sikap *kami dan mereka* yang didorong oleh egoisme serta harga diri identitas. Hal ini berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan, masa depan OAP (kesejahteraan) dan secara khusus telah mendistorsi identitas ke-Papuaan. Beberapa kajian seperti Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari (LIPI) tahun 2018 terkait Pemilihan Gubernur Papua 2018: Politik identitas, Tata kelola pemerintahan, dan ketahanan orang asli Papua. Kajian Fernandus Snanfli dkk. (2018) terkait Politik Identitas etnik Asli Papua berkontestasi dalam Pemilihan kepala Daerah di Kota Sorong. Kajian I Ngurah Suryawan tahun 2018 terkait Siasat Elit Mencuri Kuasa; Dinamika Pemekaran daerah di Papua dan Kajian Prof. Haryanto di Kabupaten Sorong Selatan (2015) terkait Politik Kain Timur, Instrumen meraih kekuasaan. Semua kajian ini menekankan kesamaan pada kebangkitan identitas sebagai kekuatan sekaligus komoditas politik dalam pilkada, serta implikasi identitas dalam perekrutan dan penempatan pejabat dalam birokrasi di Papua.

Dalam konteks Kabupaten Maybrat juga mengalami hal yang sama, seperti yang dialami daerah lain yakni menguatanya politik identitas sebagai kekuatan politik baik dalam Pilkada maupun birokrasi. Ada dua pertimbangan. *Pertama*, Kabupaten Maybrat merupakan Kabupaten yang terdiri dari satu suku atau etnis asli yakni etnis Maybrat. Ini tentu berbeda dengan Kabupaten/Kota lain di Papua yang terdiri atas beragam etnis asli dan pendatang, sehingga pertarungan kepentingan cenderung pada level antar etnis. Konteks Maybrat, tentu peneliti akan menelusuri pada identitas yang lebih mikro dan sempit yakni sub-sub dari etnis Maybrat; seperti sub Ayamaru, sub Aifat dan sub Aitinyo. Sehingga, dalam kajian ini secara khusus peneliti berfokus pada identitas etnis (sub-sub etnis Maybrat). *Kedua*, dinamika politik identitas. Sejak resmi dimekarkan sebagai daerah

otonomi baru (DOB) tahun 2009, pertarungan identitas sub-sub etnis sudah tercium terutama terkait dua hal; (1) Klaim sejarah dan tokoh pemekaran, serta (2) sengketa letak ibu kota kabupaten. Pertarungan ini cenderung menghadapkan sub Ayamaru *versus* Sub Aifat, sedangkan sub lain bisa dikatakan kurang menonjol. Misalnya dalam pilkada tahun 2011 dan pilkada tahun 2017, isu yang dibawa adalah pertarungan identitas sub etnis Aifat *versus* sub etnis Ayamaru, serta perebutan letak ibu kota kabupaten Maybrat.

Pada intinya, kedua kontestasi pilkada tersebut diwarnai dengan pertarungan identitas antara sub Ayamaru dan Sub Aifat serta sub-sub lain berkolaborasi dengan kedua sub tersebut. Isu seperti letak ibu kota akan pindah, egoisme sikap *kami dan mereka* menjadi menu dalam menggiring masyarakat dengan sentimen sub etnis, kampungisme, margaisme dan agama menjadi bahan utama, dibanding politik yang menawarkan ide, gagasan, dan program yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Maybrat. Menguatnya politik identitas bukan saja pada momen pilkada, namun paska pilkada politik identitas tetap ada. Hal ini bisa terlihat dalam tubuh birokrasi dan arah kebijakan serta program dan proyek-proyek yang cenderung mengedepankan identitas yang ada dalam masyarakat Maybrat, seperti identitas sub etnis, agama, marga dan kampung serta identitas sektoral atau kewilayahan (Misalnya, wilayah utara *versus* selatan). Fokus kajian ini pada praktik politik identitas dalam penempatan jabatan dalam birokrasi. Sehingga, pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan yakni ; 1) Bagaimana praktik politik identitas dalam penempatan jabatan dalam birokrasi di kabupaten Maybrat? dan, 2) Mengapa politik identitas menguat di kabupaten Maybrat?

Memahami Identitas

Identitas merupakan hal yang penting, karena identitas merupakan pemahaman tentang diri sendiri. Identitas meliputi berbagai aspek, seperti kebudayaan, etnis, kelas sosial, agama, maupun jenis kelamin. Identitas memberikan gagasan tentang siapa diri seseorang atau siapa diri kolektif sekelompok orang (Sabara 2018:5). Artinya identitas seseorang dalam kelompok bisa beragam dan berbeda, tidak kaku. Misalnya, seseorang memiliki identitas etnis A, namun belum tentu memiliki identitas agama yang sama dengan kelompok etnis A. Sebab kita tahu bahwa dalam satu etnis bisa terdapat lebih dari satu agama. Begitu juga kelas sosial dan jenis kelamin. Sehingga identitas seseorang bisa cair dan tidak kaku. Namun satu identitas akan menonjol tergantung konteks (arena dan kepentingan) mana identitas tersebut digunakan.

Sedangkan Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang fokus perhatannya adalah perbedaan sebagai suatu kategori politik yang utama. Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan: Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tanpa tidak dapat diubah, maka status sebagai anggota dan bukan anggota dengan serta merta tanpa bersifat permanen (Muhtar Haboddin, 2012). Poin penting kedua pendapat pakar tersebut bahwa politik identitas bisa diartikan secara sederhana sebagai “*politik perbedaan*”, untuk menentukan siapa yang disertakan dan ditolak, sebagai anggota dan bukan anggota kelompok tertentu. Menurut peneliti, ada dua pokok penting dalam memahami politik identitas. *Pertama*, bahwa identitas merupakan sesuatu yang tak terelakan bagi individu maupun kelompok masyarakat, *kedua* bahwa politik identitas dimaknai sederhana sebagai “politik perbedaan” yang merujuk pada kedirian seseorang maupun kelompok, sehingga adanya dikotomi “kita dan mereka”.

Pemahaman identitas yang dirumuskan oleh sebagian ahli cenderung menekankan pada titik; *politik perbedaan*, atau bagaimana orang mendefinisikan diri dan kelompok mereka berbeda dengan yang lainnya, serta dalam tataran praktis (kegunaannya). Namun tidak banyak ahli yang mencoba memberi jalan yang lebih dalam atau dasar yang lebih filosofis ; mengapa politik identitas ada? Bagi peneliti, Francis Fukuyama adalah orangnya, yang memberi telaah yang lebih jauh terkait dasar kemunculan politik identitas.

Dalam buku IDENTITAS, Tuntutan Martabat Dan Politik Kebencian (2020). Menurutnya bahwa politik identitas selalu didorong oleh tuntutan atas martabat. Politik identitas dimana-mana merupakan perjuangan untuk pengakuan Martabat (Fukuyama 2020:221). Bahkan baginya manusia tidak hanya membutuhkan hal eksternal dari mereka sendiri, seperti makanan, minuman, Lamborgini dan lainnya. Melainkan mereka juga menginginkan penilaian positif mengenai dirinya atau martabat mereka (Fukuyama 2020:19). Martabat merupakan salah satu aspek penting dalam diri dan kelompok orang. Fukuyama juga mengutip pandangan Rousseau bahwa sentimen pertama manusia adalah eksistensinya, eksistensi akan berubah menjadi apa yang sekarang disebut pengalaman hidup, yang merupakan akar dari politik identitas kontemporer (Fukuyama 2020:35). Sehingga pemicu politik identitas bukan soal materi ekonomi atau pragmatisme politik belaka, melainkan sesuatu yang otentik dalam diri manusia- eksistensi, yang berujung pada tuntutan dan pengakuan atas martabat. Pada titik ini, Fukuyama telah memberi jawaban

yang cukup berbeda bahkan lebih dasar, dibandingkan beberapa ahli yang cenderung melihat politik identitas sebagai pendefinisian diri (individu dan kelompok) untuk menjadi berbeda dengan lainnya - politik perbedaan.

Ada tiga aspek penting terkait Martabat, dimana Fukuyama membawa konsep tersebut dari karya Plato –*Republic*. Pertama *Thymos* adalah bagian jiwa manusia yang ingin diakui, manusia butuh pengakuan dari orang lain dan ini hal yang inheren bagi manusia. Kedua *isothymia*, bagian jiwa yang ingin kesetaraan, bahwa manusia selalu ingin setara dengan orang dan kelompok lain, tidak ada manusia yang secara alami ingin terlihat dan dianggap rendah dari manusia lain. Ketiga *Megalothymia*, bagian jiwa yang ingin diakui sebagai yang superior, manusia juga punya sifat ini, selalu ingin diakui sebagai yang dominan dan superior. Demokrasi liberal telah mengakomodari *Thymos* dan *isothymia*, setiap hak individu diakui dan semua orang dianggap setara (Fukuyama, 2018: 16-26). Bagi peneliti, pandangan Fukuyama sangat penting dalam mengkaji fenomena politik identitas secara mendalam, terutama melihat bagaimana dorongan politik identitas itu muncul, dengan melihat tiga komponen jiwa yang dipinjamkan dari gagasan Plato. Hal ini juga akan membantu peneliti menjelaskan mengapa orang akan merasa marah ketika identitasnya direndahkan atau dihina, di sisi lain sering muncul perasaan kebanggaan atas identitas yang dimiliki, baik secara individu maupun kelompok. Entah itu identitas agama, ras, etnis, marga, kampung maupun identitas lainnya. Secara khusus dalam kajian ini, peneliti berfokus pada identitas etnis.

Etnis Maybrat

Etnis dapat dimaknai sebagai kumpulan orang yang berasal dari, keturunan sama, berlatarbelakang sejarah dan budaya sama, dan bertempat tinggal dalam kelompok pada teritori tertentu. Mereka bersolidaritas dalam kelompok yang ikatannya kuat dan punya kesadaran terhadap kepentingan bersama. Sementara itu etnisitas, mengacu bukan pada sifat yang melekat (*property*) pada kelompok, melainkan lebih merujuk pada aspek yang berhubungan atau berkaitan dengan etnis. Etnisitas merujuk pada konsep relasi yang berdasar atas pengkategorian kumpulan orang yang membentuk dan dibentuk oleh kepentingan kolektif (Petersen 1982, Guibernau dan Rex 1999, Hutchinson dan Smith 1996 dalam Haryanto 2015:28). Artinya etnis merujuk pada keturunan, sejarah dan budaya serta tempat tinggal, sedangkan etnisitas merujuk pada relasi dalam

etnis tersebut. Namun ada penekanan penting bahwa dalam etnis selalu terdapat solidaritas dan kesadaran akan kepentingan bersama.

Secara etnis kabupaten Maybrat sedikit istimewa dibandingkan kabupaten/kota lain di tanah Papua, yang rata-rata memiliki lebih dari satu identitas etnis. Namun di Maybrat cukup berbeda, karena memiliki identitas etnis tunggal (Etnis Maybrat), namun ada fragmentasi sehingga tercipta sub-sub etnis. Etnis Maybrat memiliki tiga sub etnis utama yang dikenal luas dengan akronim A3, yang sering dianggap sebagai sinonim dari etnis Maybrat. A3 terdiri dari; Ayamaru, Aifat dan Aitinyo. Namun sebenarnya masih ada sub identitas lain yang masih kabur didefinisikan dan sering dimasukkan sebagai bagian sub Ayamaru dan juga Aifat, yakni sub etnis Mare. Secara rinci jumlah penduduk berdasarkan sub etnis : Aifat (13.582), Ayamaru (11.157), Atinyo (12.913) dan Lainnya (1.539) atau total 38.192 berdasarkan data BPS 2018 dan diolah peneliti 2022. Terlihat bahwa secara jumlah hampir seimbang, hanya perbedaan sekitar 1000 dan 2000 jiwa. Namun secara kekuatan Politik, cenderung ada di sub Etnis Ayamaru. Sebab kenyataannya banyak pejabat, pembisnis dan politisi lebih banyak dan sukses berasal dari sub Ayamaru. Konteks kabupaten Maybrat saja, sejak pemekaran (2009) hingga tahun 2022 ini, bupati terpilih, serta ketua DPRD selalu berasal dari sub etnis Ayamaru. Konteks kajian ini secara khusus akan membahas terkait dua sub etnis utama yang sering bertarung, yakni Ayamaru vs Aifat.

Birokrasi – Merit Sistem

Upaya reformasi birokrasi sering berjalan lambat ketika, aspek politik menysar dalam tubuh birokrasi, termasuk politik identitas. Perekrutan dan penempatan jabatan cenderung melihat kesamaan identitas tertentu, sehingga membuat birokrasi kita terlihat seperti urusan keluarga tertentu. Bagi Max Weber birokrasi ialah suatu badan administratif tentang pejabat yang diangkat. Weber juga memandang birokrasi sebagai hubungan kolektif bagi golongan pejabat, suatu kelompok tertentu dan berbeda yang pekerjaan dan pengaruhnya dapat dilihat di semua jenis organisasi (Albrow 2005:41). Sedangkan, menurut Peter M. Blau dan W. Meyer dalam bukunya “Bureaucracy” birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi. Sedangkan menurut Rourke birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan

dengan tertulis oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya (Rina Martini, 2012:9). Artinya, penekanan memperhatikan kemampuan dan keahlian seseorang dalam posisi tertentu sangatlah penting, itulah aturan main birokrasi.

Berbagai konsep birokrasi Weberian yang berkembang saat ini, sekurang-kurangnya mengutip (Albrow 2005:109-132) dapat dirangkum menjadi tujuh pengertian, yaitu: 1) Birokrasi sebagai organisasi yang rasional. 2) Birokrasi sebagai lisensi organisasional . 3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh para pejabat. 4) Birokrasi sebagai administrasi negara atau publik. 5) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh para pejabat . 6) Birokrasi sebagai bentuk organisasi yang memiliki ciri-ciri dan kualitas tertentu. 7) Birokrasi sebagai salah satu ciri masyarakat modern. Menurut peneliti, ketujuh poin ini menekankan dua hal mendasar yakni birokrasi sebagai organisasi rasional dan ciri masyarakat modern. Artinya cara kerja birokrasi mesti didasarkan pada pilihan dan keputusan rasional, dan ini merupakan ciri masyarakat modern. Dalam konteks Indonesia, sejak reformasi, birokrasi mengalami perubahan bersama yakni “ reformasi birokrasi” asumsi dasarnya bahwa birokrasi kita selama orba adalah birokrasi yang terkontaminasi politik, cenderung tradisional, banyak praktik patriomonial dan patronase. Sehingga perlu adanya reformasi untuk memperbaiki sistem, cara berpikir, dan budaya birokrasi.

Weber juga menawarkan 9 tipe ideal birokrasi yang menurut peneliti dikembangkan kini menjadi prinsip merit (sistem merit) dalam birokrasi. Sistem Merit merujuk pada pasal 1 Ayat 22, UU 5/2014 tentang ASN, menegaskan bahwa kebijakan dan manajemen ASN jangan melihat dan menilai berdasarkan kesamaan identitas, melainkan berdasarkan kualifikasi dan kualitas seseorang. Ini merupakan penekanan penting bila kita ingin reformasi birokrasi bisa berjalan baik. Setiap orang yang diangkat atau diberi jabatan betul-betul dilihat secara objektif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif-kualitatif, sedangkan objek penelitian yakni praktik politik identitas dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu (September – Desember 2021). Teknik pemilihan subjek pada penelitian ini yakni dipilih orang yang paling banyak mengetahui proses berlangsung/berjalannya peristiwa yang ingin diteliti, sehingga teknik yang digunakan adalah *purposive*. Pada awalnya telah ditetapkan beberapa orang yang menurut peneliti,

mereka adalah orang-orang yang terlibat atau sebagai pelaku (*orang kunci*) dalam praktik politik identitas dalam birokrasi di kabupaten Maybrat, yakni ; beberapa pejabat dalam birokrasi. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pengumpulan data-data skunder melalui dokumen resmi dan media masa (online). Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan informasi dan data yang diperoleh dengan tujuan menguji keabsahan data. Selanjutnya, data dikumpulkan kemudian direduksi, disajikan untuk dianalisis dan ditarik kesimpulan, serta membuat rekomendasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Maybrat, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat yang dimekarkan pada tahun 2009 dengan ibu kota di kumurkek (distrik Aifat). Kabupaten Maybrat memiliki 24 wilayah distrik dan 259 Kampung, dengan luas wilayah Berdasarkan data BPS tahun 2018 Jumlah penduduk di Kabupaten Maybrat pada tahun 2018 Sebanyak 38.191.000 dan memiliki luas wilayah 5.462 km².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Politik Identitas dalam Birokrasi di Kabupaten Maybrat

Pemberian jabatan dalam birokrasi di kabupaten Maybrat, dominan dilatari oleh kepentingan politik. *Pertama*, hasil pilkada tahun 2017 dan *kedua*, sentimen identitas (politik identitas). Sebab, terlihat bahwa dominasi jabatan penting di lingkup pmda Maybrat diisi oleh pendukung bupati dan identitas etnis tertentu (Sub etnis Ayamaru).

Tabel 2. Pejabat berdasarkan Sub Etnis Maybrat

No	Dinas/Bidang/ Kesekretarian	Pejabat	Asal Sub Etnis
1	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Kornelis Kambu	Ayamaru
2	Kesehatan	Paber Hutahaeon	Non- Papua
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Theopilus Yaam, S.Sos	Aifat
4	Dinas Sosial	Drs. Magdalena tenau,MM.	Aifat
5	Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah kampung	Drs. Adam Antoh,M.Kes	Aitinyo
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Onavia De Lora Sraun, SE,MM	Ayamaru
7	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Ismail, S.IP,M.AP	Non-Papua
8	Badan perencanaan pembangunan daerah	Yance Howay	Ayamaru
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Onavia De Lora Sraun, SE,MM	Ayamaru
10	Inspektorat	Dr. Noamy N Howay, S.Km.M.Kes.	Ayamaru (Istri Bupati)

Sumber : berbagai data dan dioleh peneliti 2022

Tabel di atas menunjukkan beberapa jabatan yang dianggap penting menurut peneliti, dominan diisi oleh sub etnis Ayamaru (sub etnis asal bupati), sedangkan lainnya termasuk non-Papua adalah pendukung bupati saat pilkada tahun 2017. Pola dan komposisi ini juga berdampak pada struktur dalam OPD tertentu, misalnya jabatan dalam sub bagian, kepala seksi dan bendahara, cenderung mengikuti pola kesamaan identitas dan juga kesamaan dukungan politik. Pada intinya, terlihat bahwa sub Ayamaru keluar sebagai yang dominan, sedangkan sub lain ada dalam posisi yang tidak diuntungkan (kalah).

Sedangkan beberapa jabatan yang diisi oleh sub Aifat, terutama yang beda dukungan saat pilkada 2017, merupakan upaya mendamaikan konflik yang ada, antara sub Ayamaru *versus* Sub Aifat. Pada posisi ini peneliti melihat bahwa konflik identitas sub etnis tidak murni aspirasi masyarakat melainkan juga rekayasa elit (konflik kepentingan elit). Buktinya ketika mereka diberi jabatan, semua diam dan damai. Artinya kepentingan elitlah yang memobilisasi masa dan membangkitkan sentimen identitas dalam pertarungan yang sering terjadi kabupaten Maybrat. Walau tetap diakui bahwa sentimen identitas selalu ada dalam kelompok mana pun, apalagi dalam konteks etnis Maybrat, sudah ada sejarah pertarungan antara sub-sub etnis yang ada di dalamnya. Namun menurut peneliti pemicunya elit-elit yang ada dalam kelompok identitas tersebut, dengan memanfaatkan luka (sentimen identitas) yang sudah ada.

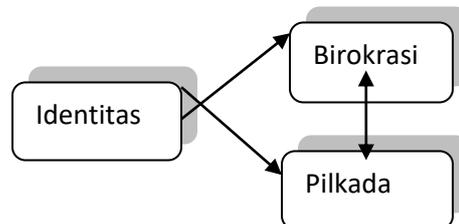
Praktik tersebut hanya akan memperburuk praktik penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Maybrat, karena orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan tertentu, cenderung tidak melihat kualitas dan keahlian tertentu, melainkan melihat kesamaan dukungan politik dan kesamaan identitas. Bahkan jabatan seperti kepala sekolah, kepala distrik, diberikan karena dukungan politik, menurut peneliti telah merusak prinsip-prinsip dalam birokrasi, terutama upaya dalam reformasi birokrasi, ada prinsip merit sistem bahwa seseorang diberikan jabatan harus memenuhi aspek ; kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Namun yang terjadi justru diberikan karena basis pertimbangan politik, asal usul (sub etnis), bahkan mengabaikan kemampuan dan keahlian seseorang, dan mungkin saja orang-orang dengan kemampuan tertentu tersingkir dari jabatan karena perbedaan dukungan politik dan identitas.

Apa yang terjadi di Kabupaten Maybrat, telah mengkonfirmasi salah satu kajian terdahulu dari Ferinandus L Snafli pada tahun 2018 di Kota Sorong (wilayah yang

berdekatan dengan Kabupaten Maybrat) menemukan setidaknya ada tiga hal. Salah satunya, bahwa Praktik politik identitas yang dijalankan dalam birokrasi pemerintahan, ditunjukkan dengan adanya dominansi identitas etnik dari kepala dinas, sekretaris, jabatan struktural, serta dinas basah. Implikasinya mereka cenderung berorientasi pada kepentingan kelompok dibanding kepentingan umum. Bahkan jabatan kepala sekolah dengan latar belakang politis, memperburuk kualitas pendidikan di Maybrat. Akhirnya, Birokrasi cenderung melayani kekuasaan (kelompok tertentu), bukan orientasi pada pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat juga dipilah-pilah, memprioritaskan kelompok kepentingan.

Peneliti melihat bahwa politik identitas dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat cenderung terjadi pada level jabatan-jabatan besar dan basah di lingkup OPD, sedangkan jabatan di bawahnya hingga kepala distrik, kepala sekolah, kepala puskesmas dan lainnya cenderung murni pertimbangan politik pilkada tahun 2017. Artinya politik identitas hanya berlaku pada level atas (ketika sub etnis A bertemu Sub Etnis B). Pada level yang rendah tingkat distrik hingga kampung (yang satu sub etnis) maka praktiknya cenderung transaksional, atau murni politik balas jasa. Di sini muncul satu syarat, bahwa politik identitas muncul apabila ada perjumpaan dengan identitas lain, namun jika satu identitas saja, maka pragmatisme politik cenderung muncul. Birokrasi pemerintahan di Kabupaten Maybrat cenderung mengikuti praktik *spoil* sistem (cenderung subjektifitas), bukan meritokrasi. Hal ini dilatari oleh politik balas jasa dari pilkada tahun 2017 dan sentimen identitas. Skema sederhana untuk memahami praktik tersebut :

Gambar 1. Politik identitas di Kabupaten Maybrat



Balas jasa politik pilkada sebenarnya juga sarat akan identitas, sebab isu dan narasi identitas sangat dominan digunakan saat kontestasi pada pilkada tahun 2017. Artinya, basis ada pada politik identitas, baik dalam pilkada maupun dalam rekrutmen dan penempatan jabatan pada birokrasi. Sehingga, peneliti bisa menegaskan bahwa politik identitas menguat di kabupaten Maybrat, dan sangat berpengaruh terhadap birokrasi pemerintahan.

Penyebab Menguatnya Politik Identitas di Kabupaten Maybrat

Mengapa politik identitas menguat di kabupaten Maybrat. Menurut peneliti ada beberapa penyebab, antara lain : *Pertama*, kebangkitan politik identitas sebagai tuntutan atas martabat. Peneliti melihat lebih jauh terkait praktik tersebut, bagaimana sub etnis Ayamaru mendominasi, terutama pertarungannya dengan sub etnis Aifat. Ada dua peristiwa penting; pertama, sejarah panjang pertarungan politik sejak kabupaten tersebut dimekarkan, dan kedua, pertarungan pilkada yang sarat akan isu perpindahan ibu kota kabupaten. Sehingga isu utama yang dijual dalam pilkada soal *wan kreek* (Pusaka) ibu kota, sehingga menghadirkan konfrontasi sub etnis Ayamaru *versus* sub etnis Aifat (sub-sub lain, bisa dikatakan sebagai pemain, namun bukan pemeran utama). Sebagai gambaran, ibu kota Maybrat berada di wilayah sub etnis Aifat, sedangkan kelompok sub etnis Ayamaru berupaya agar ibu kota kabupaten pindah ke wilayah mereka.

Peneliti melihat, bahwa isu yang dibangun terkait *waan kreer* dan harga diri orang Aifat, tidak terlepas dengan peristiwa pertama yaitu permusuhan Aifat *versus* Ayamaru sejak ide pemekaran kabupaten dimulai. Ketika masih menjadi bagian dari kabupaten Sorong, anggapan dan penilaian sub Ayamaru kepada sub Aifat yang terlihat merendahkan bahkan menghina, seperti : terbelakang, hutan, lambat terima terang (peradaban), dan penghinaan-penghinaan lainnya yang memicu sejarah awal konflik tersebut, di sisi lain sub etnis Ayamaru merasa superior, sebagai yang pertama menerima peradaban, maju, terdidik dan lainnya., kondisi ini diperparah dengan konflik kepentingan elit. Kondisi ini juga melahirkan apa yang secara lugas Francis Fukuyama (2018) sampaikan bahwa Politik Identitas merupakan tuntutan pengakuan atas martabat dan politik kebencian. Ada dua kata kunci, tuntutan martabat dan kebencian. Ketika ada kelompok identitas yang dihina atau direndahkan, maka mereka menuntut pengakuan martabat kelompok mereka (harga diri), sedangkan di saat bersamaan, muncul perasaan kebencian terhadap kelompok yang merendahkan mereka (muncul perasaan perbedaan dan permusuhan). Kondisi ini yang dialami oleh sub etnis Aifat, sehingga, sering muncul narasi “ harga diri orang Aifat” dalam berbagai kesempatan yang konfrontatif.

Sedangkan, sub etnis Ayamaru mengalami apa yang Plato sebut dalam republik sebagai *megalothymia*, konsep yang digunakan Fukuyama untuk menjelaskan politik identitas kontemporer. *Megalothymia* merupakan perasaan untuk diakui (merasa) sebagai superior. Menurut peneliti secara tidak sadar perasaan ini yang mencokol dalam diri sub etnis Ayamaru. Hal ini diperparah oleh kondisi politik bahkan dalam pengisian jabatan,

ketika satu sub etnis tertentu mendominasi dalam birokrasi, hanya akan menghadirkan perasaan inferior dari sub etnis lain, potensi terasa terhina martabatnya, rasa benci yang berujung pada perjuangan untuk pengakuan (martabat kelompok), sehingga memicu peratungan identitas. Seperti saat pilkada serta berlanjut pada penempatan pejabat dalam birokrasi, menghidupkan masalah klasik (Aifat vs Ayamaru) itu tetap ada.

Kedua, Kebangkitan politik identitas sebagai siasat elit lokal. Ada peristiwa perjanjian damai antara sub Aifat dan Sub Ayamaru, dengan syarat tak tertulis bahwa beberapa elit Aifat diberi jabatan dalam birokrasi pemerintahan, walau mereka berbeda dukungan politik dengan bupati definitif saat pilkada tahun 2017. Sekarang kondisi aman dan damai, pertikaian antara Aifat dan Ayamaru menjadi reda, bahkan tidak nampak (setelah elit berbagi jabatan dan proyek). Peneliti melihat, bagaimana bila mereka ini tidak diberi jabatan dalam birokrasi, kemungkinan isu, narasi, serta konfrontasi antara sub Aifat dan sub Ayamaru pasti digaungkan, dengan kalimat kunci; Politik demi martabat atau harga diri orang Aifat. Melihat kenyataan ini, sehingga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kemala Chandakirana 1989, dalam Muhtar Haboddin (2012), yang peneliti menangkap bahwa politik identitas sekedar rekaya dan siasat elit politik, untuk kepentingan mereka (kekuasaan dan ekonomi). Sehingga, konflik sub etnis Aifat dan sub etnis Ayamaru di Kabupaten Maybrat, tidak murni aspirasi masyarakat, melainkan juga digerakan oleh elit tiap etnis yang ada, dengan agenda terselubung mereka – kekuasaan (jabatan, proyek dan uang). Faktanya ketika mereka berdamai dan membagi posisi dalam birokrasi dan sumber-sumber lain dalam pemerintahan, isu dan narasi antar sub etnis di Maybrat terlihat kondusif dan damai. Sehingga, apa yang disampaikan Kemala Chandakirana, tidaklah keliru, bahwa elit dari kelompok etnis cenderung menjadi pematik yang membangkitkan sentimen identitas untuk kepentingan pribadi mereka (jabatan). praktik tersebut juga mempertegas kajian Suryawan (2019) yang peneliti telah paparkan pada bagian awal tulisan ini.

Ketiga, Fakta Sosial. Maksud peneliti bahwa kehidupan masyarakat Maybrat sangat terikat kuat pada kesetiaan akan identitas kolektif seperti kekerabatan, marga dan termasuk sub etnis, hal ini tercipta dalam waktu yang panjang, lewat interaksi, perkawinan, ritual adat dan lainnya. Sehingga, orang Aifat akan merasa diri sebagai orang Aifat, dibandingkan kesadaran akan identitas bersama sebagai orang Maybrat, begitu juga orang Ayamaru, dan Aitinyo. Artinya identitas Maybrat masih lemah, dan harus diperjuangkan hingga terjadi integrasi ke dalam identitas bersama: Maybrat. Fakta sosial lain, bahwa satu

kondisi yang menciptakan kesadaran identitas bersama sebagai orang Maybrat belum ada, yaitu musuh bersama (kelompok identitas lain). Maksud peneliti, ketika muncul musuh bersama, atau identitas etnis lain yang menonjol, maka kemungkinan kesadaran akan kebersamaan orang Maybrat muncul dan menjadi kuat. Karena satu kondisi lahirnya politik identitas adalah adanya perjumpaan dengan identitas lain, di sinilah eksistensi sebuah identitas bersama diperjuangkan.

Keempat, Kekuasaan (bupati). Bupati memiliki kewenangan mutlak (walau kemungkinan ada intervensi dari pihak lain). Bupati memainkan peran patron, sedangkan pejabat yang diberikan jabatan memainkan peran klien. Dari ketiga pejabat yang peneliti jumpai, dua kepala distrik dan satu asisten pemerintahan terdapat latarbelakang yang berbeda, kedua kepala distrik diberi jabatan karena dukungan mereka terhadap bupati terpilih saat pilkada tahun 2017, sedangkan asisten tersebut memperoleh jabatan (secara tak langsung) akibat perjanjian damai antara kelompok bupati (sub Ayamaru) dan kelompok Aifat. Merujuk Aspinall dan Mada Sukmajati (2015:22-28) merumuskan lima bentuk patronase. Salah satu bentuknya yaitu pemberian pribadi (*Individual gifts*), baik dalam bentuk barang atau jasa (seperti jabatan). sehingga, politik identitas dalam birokrasi di kabupaten Maybrat, secara langsung juga mempraktik relasi patronase. Pejabat yang memperoleh jabatan tersebut wajib memberi loyalitas kepala bupati, bukan saja dalam relasi formal pemerintahan, namun loyalitas di luar aktivitas formal.

Di mana hilir dan hulu dari praktik pemberian jabatan dalam birokrasi di Kabupaten Maybrat yang sarat akan motif balas jasa politik (praktik patronase) dan sentimen identitas? peneliti melihat bahwa hirir dan hulu ada pada kekuasaan (kepala daerah dan kroninya). Jawaban tersebut dibangun atas pertimbangan utama bahwa yang punya kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat dalam OPD yaitu kepala daerah-bupati. Sehingga, praktik buruk yang telah dipaparkan sebelumnya berasal dan bermuara pada kekuasaan (bupati dan kroninya). Orang-orang yang ditempatkan dalam jabatan merupakan pendukung bupati dalam pilkada tahun 2017, di luar itu beberapa jabatan diberikan kepada sub etnis Aifat sebagai perjanjian tak tertulis dari perjanjian damai antara kedua sub identitas yang ada. Semua pejabat ini bekerja melayani kekuasaan. Logika yang seharusnya ada dikepala penguasa bahwa, harus menempatkan orang yang kompeten dan mau mengabdikan bagi daerah tersebut. Dengan asumsi kinerja baik mereka akan berdampak kualitas penyelenggaraan pemerintahan, serta citra bupati sebagai kepala daerah yang berhasil dalam memimpin. Namun logika ini tidak berfungsi ketika beban

politik balas jasa cukup besar, mau tidak mau jabatan harus dibagikan kepada pendukungnya.

Mengurangi Kebangkitan Politik Identitas

Bagi peneliti politik identitas tidak akan hilang, sebab politik identitas bisa dianggap hal yang inheren dalam kehidupan sosial politik secara individu maupun kelompok. Yang bisa dilakukan adalah mengurangi pengaruh identitas yang menciptakan perbedaan, keterpecahan dan konflik dalam kehidupan bangsa yang multi identitas. Secara khusus dalam konteks birokrasi, agar birokrasi berjalan sesuai misinya – mewujudkan birokrasi yang benar-benar berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ada empat cara : *Pertama*, peneliti merujuk kembali pada konsep *isothymia* yang dipinjamkan Fukuyama dari Plato-republik. *Isothymia*, peneliti membaca sebagai upaya mewujudkan kesetaraan. Bagi peneliti, kesetaraan adalah solusi untuk mereda gejala identitas. Kesetaraan dalam berbagai kesempatan dan ruang, termasuk dalam politik dan pemerintahan (birokrasi). Bahkan paling penting dalam kebijakan pembangunan, dalam konteks ini, peran pemimpin (bupati) sangat penting, harus hadir sebagai raja yang adil, melihat orang yang dipimpinnya sama, tanpa membedakan- menciptakan rasa kebersamaan. *Kedua*, menciptakan dan memperkuat identitas bersama. Bagi peneliti identitas bersama yang dimaksud adalah sebagai orang Papua dan khusus etnis Maybrat tanpa melihat fragmentasi yang ada. Sentimen sub etnis di Maybrat mesti dihilangkan dengan membangun kesadaran bersama sebagai orang Maybrat (Etnis Maybrat). Kesadaran identitas bersama ini, jika terawat baik, maka perasaan saling membedakan dan bermusuhan akan berkurang. Namun identitas bersama, membutuhkan poin pertama ; *Isothymia* (adanya kesetaraan).

Ketiga, dari identitas ke kondisi objektif. Maksud peneliti, kesadaran akan kondisi objektif, seperti kondisi ekonomi- kesejahteraan dan kebijakan pemerintah yang menyiksa masyarakat (hanya menguntungkan oligarki lokal) harus dikedepankan oleh masyarakat, dibanding sentimen identitas. Sehingga, konsentrasi masyarakat diarahkan dalam memperjuangan dan menuntut hak mereka – terutama kesejahteraan. Kesadaran ini, juga akan mengurangi masyarakat terjebak dalam siasat elit yang membungkus kepentingan mereka dengan isu dan narasi identitas. *Keempat*, mengikuti aturan main. Maksud peneliti, pemerintah (bupati) harus tegas mengikuti aturan main birokrasi (meritokrasi) dalam perekrutan dan penempatan pejabat dalam birokrasi. Agar menciptakan birokrasi yang

mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik (*good governance*). Namun, bagi peneliti aturan main birokrasi akan terwujud apabila ketiga poin di atas telah dijalankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah disajikan sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat mempraktikkan sistem *spoil* dalam perekrutan dan penempatan pejabat dalam struktur OPD. Dua faktor penyebab hal tersebut yaitu hasil pilkada tahun 2017 (politik balas jasa) dan sentimen kesamaan sub etnis. Sub etnis yang dominan atau mendominasi birokrasi kabupaten Maybrat adalah sub etnis Ayamaru (sub etnis asal bupati Maybrat). Sedangkan, dalam kontestasi pilkada tahun 2017 juga sangat kuat didorong oleh sentimen identitas. Sehingga, peneliti menyimpulkan bahwa basis dari sistem *spoil* dalam birokrasi adalah sentimen identitas (politik identitas). Sedangkan, menguatnya politik identitas di kabupaten Maybrat, didorong oleh empat hal : 1) sejarah masa lalu (kebencian dan tuntutan martabat). 2) siasat elit yang memanipulasi masyarakat isu dan narasi “harga diri” sub identitas. 3) fakta sosial bahwa kesadaran sub identitas lebih kuat dibanding identitas bersama; Maybrat. 4) kekuasaan yang dikelola bupati Maybrat yang menyeret segala praktik ke dalam sentimen identitas. Peneliti juga menyimpulkan bahwa politik identitas tidak bisa dihentikan, melainkan bisa dikelola atau meminimalisir dampak negatif seperti perpecahan dan konflik dengan cara: 1) mewujudkan kesetaraan dalam berbagai ruang dan kesempatan, 2) menciptakan atau memperkuat identitas bersama. 3) Membangun kesadaran kolektif akan kondisi objektif dibanding sentimen identitas dan 4), Birokrasi harus dijalankan dengan mengikuti aturan main, misalnya sistem merit, agar menghindari sentimen identitas dalam rekrutmen dan penempatan pejabat.

Peneliti memberi beberapa saran : 1) Aturan main (sistem merit) dalam birokrasi musti dijalankan, agar menghasilkan birokrat yang kompeten dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. 2) Menciptakan kesetaraan dalam berbagai ruang dan bentuk, agar sub-sub etnis Maybrat tidak saling membedakan dan bermusuhan, terutama konteks pilkada dan penempatan jabatan dalam birokrasi. 3) Membangun kesadaran objektif dan menciptakan identitas bersama (sebagai etnis Maybrat), agar rasa kebersamaan muncul sebagai kekuatan, termasuk mencegah manipulasi elit yang membawa isu identitas dalam politik. 4) Pemerintah daerah (bupati) dan elit politik, tokoh dan kelompok kepentingan di kabupaten Maybrat harus memiliki sikap altruisme, dan

menyingkirkan egoisme kelompok (sub etnis), dengan sikap altruislah, kebersamaan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Maybrat bisa terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspinal, Edward & Sukmajati, Mada. 2014. *Politik Uang di Indonesia (Patronase dan Klientalisme pada Pemilu Legislatif 2019*. Yogyakarta. PolGov UGM.
- Albrow, Martin. 2005. *Birokrasi*. Yogyakarta. Penerbit Tiara wacana
- Cahyo Pamungkas & Devi Triindriasari. (2018). *PEMILIHAN GUBERNUR PAPUA 2018: Politik identitas, Tata kelola pemerintahan, dan ketahanan orang asli Papua*. Jurnal Budaya dan Masyarakat LIPI. Vol.20 NO.3 Tahun 2018. <https://jmb.lipi.go.id/jmb/article/view/721>
- Fukuyama, Francis. 2020. *IDENTITAS, Tuntutan atas Martabat dan Politik Kebencian* (Cetakan pertama). Terjemahan. Yogyakarta. Bentang Pustaka.
- Habodin, Muhtar. 2017. *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang. UB Press.
- Levitski, Steven & Ziblatt, Daniel.2018. *Bagaimana Demokrasi Mati*. Penerjemah. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Martini, Rina. 2012. *Birokrasi dan Politik*. Semarang. UPT UNDIP Press Semarang
- Sabara. (2018). *Split Nasionalisme Generasi Muda Papua di Kota Jayapura : Perspektif Teori Identitas* . Jurnal Politik Profetik. Volume 6, No. 1 Tahun 2018. <http://103.55.216.56/index.php/jpp/article/view/5805>
- Snanfli, Fernandus dkk. (2018). *Politik Identitas etnik Asli Papua berkontestasi dalam Pemilihan kepala Daerah di Kota Sorong*. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Volume 20, nomor.2, Juli 2018:122–131. <https://journal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/15089>
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung . Alfabeta.
- Suryawan, I Ngurah. 2018. *Siasat Elit Mencuri Kuasa; Dinamika Pemekaran daerah di Papua*. Basabasi. Yogyakarta.
- Suryawan, I Ngurah. 2019. *Jiwa Yang Patah (Rakyat Papua, Sejarah Sunyi dan Antropologi Reflektif)*. Basabasi. Yogyakarta.
- Wetipo, Wempi dan Medlama, Marthen. 2015. *Gunung versus Pantai ; dalam perspektif nilai-nilai hidup bersama*. Yogyakarta. AsdaMedia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN
- Undang-Undang Nomor 13 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat
- BPS Kabupaten Maybrat 2018
- <https://Maybratkab.go.id/profil/visi-dan-misi-kabupaten-Maybrat>.